

**Studi Pemilihan Perangkat Desa di Desa Ngepoh dan Desa Bandung,
Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung**

SKRIPSI

k4
Fu.P. 03/05
Ma' r
k



Diusun Oleh :

ALI MA'RUF
NIM : 070016308

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL TAHUN 2004/2005**

**Studi Pemilihan Perangkat Desa di Desa Ngepeh dan Desa Bandung,
Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik**

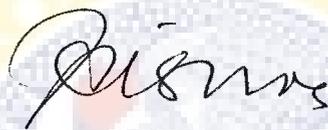


Disusun Oleh :

ALI MA'RUF
NIM : 070016308

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL TAHUN 2004/2005**

Skripsi ini setuju untuk diujikan,
Surabaya, 6 Desember 2004
Dosen Pembimbing

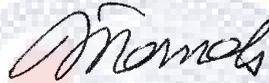


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wisnu Pramutanto', is written over a horizontal line.

Drs. Wisnu Pramutanto, Msi.
NIP. 131453124

Skripsi ini telah dipertahankan di depan
Tim penguji, pada tanggal 15 Desember 2004

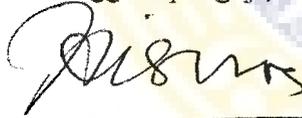
Ketua penguji,



Drs. Priyatmoko, MA.

NIP. 130937952

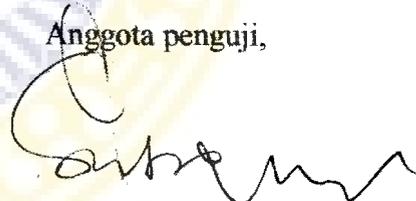
Anggota penguji,



Drs. Wisnu Pramutanto, Msi.

NIP. 131453124

Anggota penguji,



Drs. Sutrisno, MS

NIP. 130937951

Penerapan Undang-undang no. 22 tahun 1999 telah memberikan wewenang kepada daerah, termasuk desa untuk melaksanakan pemerintahan dan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat. Undang-undang tersebut telah menciptakan perluasan ranah publik di tingkat desa salah satunya yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih orang-orang yang duduk di jabatan publik (carik). Pengaturan tersebut dijelaskan di dalam Peraturan Daerah no.2 tahun 2002, Kabupaten Tulungagung tentang tata cara pengangkatan dan pencalonan Perangkat Desa. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana masyarakat desa menggunakan kesempatan sebagai perwujudan hak politiknya di tingkat desa.

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kekuatan politik lokal dalam proses pemilihan perangkat desa, bagaimana konflik yang terjadi, mengetahui resistensi konflik yang terjadi pada pemilihan beberapa pemilihan pejabat publik yang terjadi di kedua Desa. Desa-desa yang diteliti adalah Desa Ngepeh dan Desa Bandung Kabupaten Tulungagung.

Proses pemilihan tersebut tentu saja tidak bisa dipisahkan dari para pemilik kekuatan politik lokal yang mempunyai pengaruh untuk memobilisasi pada waktu pemilihan. Mereka mempunyai tujuan untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi pengaruhnya di Desa, sebagian dari mereka mempunyai motif "peningkatan kompetisi" karena pernah kalah pada pemilihan-pemilihan pejabat publik yang terjadi sebelumnya. Konflik-konflik tersebut bukanlah konflik yang hanya terjadi pada waktu proses pemilihan ini saja, tetapi merupakan ulangan dari konflik-konflik yang terjadi pada pemilihan-pemilihan pejabat publik sebelumnya yang terjadi di desa. Sebab-sebab konflik dan elit lokal yang berkonflik ternyata adalah tokoh-tokoh yang sama.

Pemilik kekuatan politik lokal yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan perangkat Desa di kedua Desa ini adalah *botoh*, dengan uang yang dimiliki mereka dapat mempengaruhi dan memobilisasi massa pada proses pemilihan. Sedangkan fenomena yang lain terjadi di Desa Bandung, dimana peran ketua RT dan RW sangat menonjol di dalam memobilisasi massa di lingkungannya.